

Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

**Sahala Purba^{1*}, Catherine Audry Rebecca Marpaung², Deda Sasmita Sinaga³,
Emisa Clara Br Ginting⁴, Tessa Anggraini Sirait⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Methodist Indonesia

Sahala824@gmail.com¹

^{*}Sahala Purba

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan data laporan keuangan tahun 2013-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis rasio keuangan dengan menggunakan data sekunder dari publikasi resmi BPS. Data time series kinerja keuangan pemerintah yang dicatat secara sistematis kemudian dielaborasi secara rinci untuk dievaluasi dalam rangka pengambilan keputusan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Rasio Tingkat Otonomi Daerah menunjukkan tingkat yang sangat rendah, dengan nilai rata-rata 6,98%; (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan kategori tinggi, dengan nilai rata-rata 90,75%; (3) Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat yang sangat rendah, dengan rata-rata 6,21%; (4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kategori kurang efektif dengan rata-rata 7,87%; (5) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kategori sangat efisien dengan rata-rata 92,93%; (6) Rasio Efektivitas Pengelolaan Fiskal Daerah menunjukkan kategori cukup efektif dengan rata-rata 97,74%; (7) Rasio Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah menunjukkan kategori efisien dengan rata-rata 19,37%; (8) Rasio tingkat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah menunjukkan kontribusi sebesar 2,87%. Sehingga dalam hal ini pemerintah pusat belum optimal dalam mengembangkan BUMD di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dari hasil analisis ini juga didapat kesimpulan bahwa pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dianggap sebagai hasil yang netral.

Kata kunci: analisis laporan keuangan; pengukuran kinerja keuangan; pemerintah kabupaten labuhanbatu selatan

Abstract

This research aims to evaluate the financial performance of the South Labuhanbatu Regency regional government based on financial report data for 2013-2022. The research method used is financial ratio analysis using secondary data from official BPS publications. Time series data on government financial performance are recorded systematically and then elaborated in detail for evaluation in the context of decision making. The research results are as follows: (1) The Regional Autonomy Level Ratio shows a very low level, with an average

value of 6.98%, (2) The Regional Financial Dependency Ratio shows a high category, with an average value of 90.75%, (3) Fiscal Decentralization Level Ratio shows a very low level, with an average of 6.21%, (4) Regional Original Revenue Effectiveness Ratio shows the less effective category with an average of 7.87%, (5) Original Revenue Efficiency Ratio Regions show the very efficient category with an average of 92.93%, (6) Regional Fiscal Management Effectiveness Ratio shows the quite effective category with an average of 97.74%, (7) Regional Tax Management Efficiency Ratio shows the efficient category with an average 19.37%, (8) The contribution level ratio of Regional Owned Enterprises shows a contribution of 2.87%. So in this case the central government has not been optimal in developing BUMD in South Labuhanbatu Regency. From the results of this analysis, it was also concluded that the overall development of South Labuhanbatu Regency carried out by the central government was considered a neutral result.

Keywords: *financial statement analysis; financial performance measurement; south labuhanbatu district government.*

DOI: <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v5i1.5355>

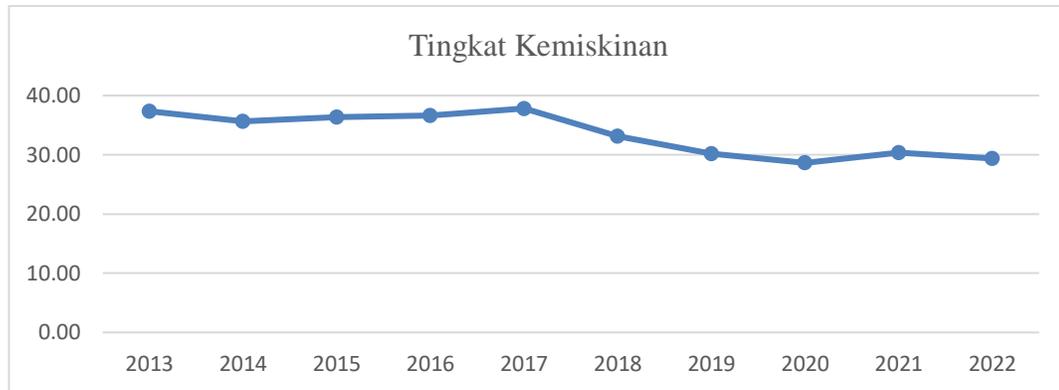
Diterima 29 Mei 2024; Direvisi 31 Mei 2024; Disetujui 10 Juni 2024

PENDAHULUAN

Ibu kota Labuhanbatu Selatan terletak di Kecamatan Kotapinang. Pemerintah daerah diberikan kewenangan atau otonomi yang proporsional, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2004. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai kemandirian daerah yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, otonomi daerah dianggap sebagai metode terbaik untuk mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah, yakni dengan mengadopsi pendekatan pembangunan yang terdesentralisasi, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai penyebab lambatnya kemajuan daerah dalam sistem pembangunan yang sentralistik. Menurut penelitian Ritonga et al. (2023), isu yang paling mendominasi adalah kemiskinan dan penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan perhatian dan tindakan komprehensif dari berbagai pihak. Pratiwi et al. (2022) menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa masalah kemiskinan muncul, yaitu (1) Terdapat perbedaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata, (2) Perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, dan (3) Lingkaran hitam teori kemiskinan.

Beberapa dekade yang lalu upaya dilakukan oleh pemerintah dan entitas lain untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu contoh upaya tersebut adalah dengan berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat (PIS) yang

memberikan bantuan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH), beserta sejumlah program lain yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan masyarakat kurang mampu (Poluakan & Nurwati, 2019).



Sumber: (BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024a)

Gambar 1 Tingkat Kemiskinan Labuhanbatu Selatan Tahun 2013-2022

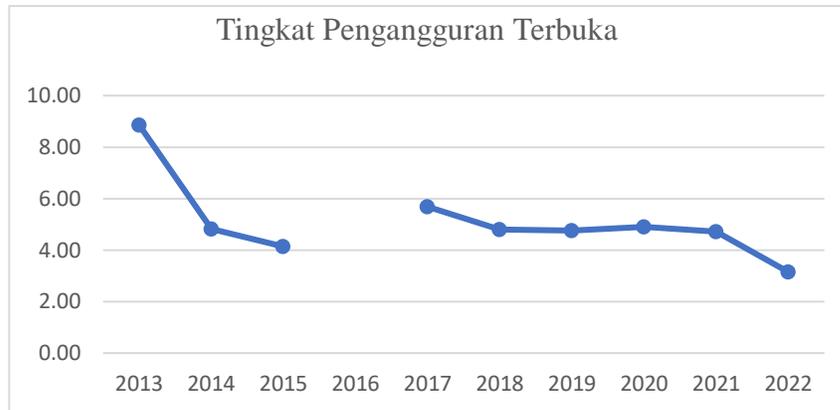
Tabel 1. Poverty Rate

Tahun	Poverty Rate
2013	37,33
2014	35,65
2015	36,37
2016	36,62
2017	37,82
2018	33,14
2019	30,17
2020	28,63
2021	30,36
2022	29,38

Sumber: (BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024a)

Menurut data di atas, angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berfluktuasi dan lebih cenderung menurun. Tahun 2014, 2018, dan 2020 adalah tahun dengan angka penurunan kemiskinan yang drastis di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu sebesar 1,68 dalam ribuan, 4,68, dan 1,54 dalam ribuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju kenaikan dan penurunan kemiskinan antara lain adalah tenaga kerja dan tingkat pengangguran.

Kemiskinan telah menjadi masalah penting yang menjadi salah satu fokus pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Kotapinang yang harus segera diatasi. Labuhanbatu Selatan dihadapkan pada tantangan kompleks terkait kemiskinan yang melibatkan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang terdampak kemiskinan di daerah ini adalah laki-laki berusia 40-50 tahun.



Sumber: (BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024b)

Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Labuhanbatu Selatan Tahun 2013-2022

Table 2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka
2013	37,33
2014	35,65
2015	-
2016	36,62
2017	37,82
2018	33,14
2019	30,17
2020	28,63
2021	30,36

Sumber: (BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024b)

Menurut data di atas, tingkat pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih cenderung turun. Pada tahun 2014, 2018, dan 2019 terjadi penurunan drastis pertumbuhan tingkat pengangguran. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021, dengan kenaikan sebesar 1,73 dari tahun sebelumnya. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang menganggur dan berusaha mencari pekerjaan, serta orang-orang yang menganggur dan aktif mencari pekerjaan, serta mereka yang belum bekerja dan berencana untuk memulai bisnis. Menurut penelitian Wicaksono & Hutajulu (2023) pengangguran memiliki berkontribusi besar dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Ditemukan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan individu yang pada akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat dan dapat menimbulkan masalah tambahan seperti kemiskinan (S.Sukirno, 2005).

Aspek-aspek penting pembangunan yang harus diselenggarakan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan adalah: membangun fasilitas Pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan

masyarakat, seperti sekolah, universitas dan madrasah. Perlunya dibangun fasilitas kesehatan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti rumah sakit, klinik dan lembaga lainnya yang fokus pada kesehatan. Pembangunan permukiman untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial, seperti rumah susun, apartemen, dan lainnya. Pengembangan industri untuk memperkuat pembangunan ekonomi, seperti pabrik, gudang, dan lainnya. Pembangunan perikanan untuk memperkuat pembangunan ekonomi, seperti pelabuhan, kapal penangkap ikan, dan lain-lain. Pembangunan pertanian untuk memperkuat pembangunan ekonomi, seperti pengelolaan lahan, irigasi, dan lain-lain. Pembangunan perkotaan, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum, untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial di suatu wilayah (Hasanah et al., 2018). Selain itu, diharapkan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mengurangi perbedaan pembangunan di antara daerah (Wibowo & Purwaningsih, 2019). Sebelum, adanya otonomi daerah pembangunan dunia masih cenderung terpusat dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat (Sarwono, 2018). Namun, otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kekuasaan yang lebih besar untuk mengelola urusan mereka sendiri (Wibowo & Purwaningsih, 2019).

Namun, dalam konteksnya struktur APBD Labuhanbatu Selatan masih bergantung pada penerimaan dana perimbangan (Wibowo & Purwaningsih, 2019). Artinya, kontribusi dana perimbangan dalam APBD jauh lebih besar dibandingkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD (Sarwono, 2016). Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih untuk diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pemerataan dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan lokal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat secara merata, adil dan berkelanjutan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses pembangunan, sehingga kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan (Muhamad nur afandi & Sianipar, 2012).

TINJAUAN PUSTAKA

Rasio Tingkat Otonomi Daerah

Menurut Budianto (2021) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang merupakan bagian dari otonomi fiskal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan swadaya masyarakat. Perhitungan rasio ini melibatkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan yang diterima dari pemerintah pusat atau provinsi, serta pinjaman. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan seberapa mandiri pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan membiayai pembangunan. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara pendapatan daerah

yang berasal dari sumber lain, seperti pendapatan transfer. Semakin tinggi rasio ini, semakin mandiri pemerintah daerah (Halim, 2012).

Tabel 3 Tolak Ukur

Kemandirian	Keterangan
0%-25%	Rendah sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Sumber: (Manalu et al., 2022)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan membandingkan pendapatan transfer pemerintah daerah dengan pendapatan keuangan daerah provinsi secara keseluruhan (Mahmudi, 2016).

Tabel 4 Tolak Ukur

Otonomi (%)	Kapasitas Keuangan	Model Koneksi
0% - 25%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah sekali	Konstruktif
50% - 75%	Sedang	Parsifatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: (Manalu et al., 2022)

Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal

emerintah pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dengan menggunakan Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal untuk mengatur dan memaksimalkan penerimaan. Tingkat desentralisasi merupakan indikator keuangan yang mencerminkan sejauh mana pemerintah pusat menyerahkan otoritas dan tugas kepada pemerintah daerah untuk menjalankan proses pembangunan. Semakin besar andil Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan total daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mampu dalam menjalankan desentralisasi (Siswanto & Maylani, 2022).

Tabel 5 Tolak Ukur

Skala%	Keterangan
0%-10%	Rendah sekali
10%-30%	Rendah
31%-40%	Cukup
41%-50%	Tinggi
>50%	Sangat tinggi

Sumber: (Manalu et al., 2022)

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi ekonomi. Rasio ini mengukur efisiensi kegiatan keuangan pemerintah daerah. Rasio efektivitas

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2016).

Tabel 6 Tolak Ukur

Skala Efektivitas	Keterangan
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup efektif
75-89	Kurang efektif
<75	Tidak efektif

Sumber: (Manalu et al., 2022)

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efisiensi PAD digunakan untuk menilai bagaimana pengeluaran pemerintah daerah berkontribusi terhadap realisasi penerimaan. Ini dihitung dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total PAD yang diperoleh (Halim, 2015).

Tabel 7 Tolak ukur

Keefisienan (%)	Kapasitas keuangan
<10%	Sangat Efisien
10%-20%	Efisien
21%-30%	Cukup Efisien
31%-40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber: (Manalu et al., 2022)

Rasio Efektivitas Pengelolaan Fiskal Daerah

Efektivitas adalah indikator kesuksesan suatu entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dilihat dari perbandingan antara dampak yang dihasilkan dengan hasil yang dicapai. *Outcome* mengacu pada pengaruh suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan *output* adalah hasil konkret dari program, kegiatan, dan kebijakan yang dilakukan (Siswanto & Maylani, 2022). Analisis efektivitas pajak daerah bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memungut pajak sesuai rencana yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan target atau anggaran berdasarkan potensi aktual di daerah tersebut (Mahmudi, 2016).

Tabel 8 Tolak ukur

Skala Efektivitas	Kapabilitas Finansial
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup efektif
75-89	Kurang efektif
<75	Tidak efektif

Sumber: (Manalu et al., 2022)

Rasio Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah

Efisiensi berkaitan dengan metode operasi, di mana suatu kegiatan dianggap efisien jika menghasilkan produk dengan menggunakan sumber daya dan dana minimal. Efisiensi dapat dihitung melalui perbandingan antara output dan input. *Output* mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan daerah (Siswanto & Maylani, 2022). Efisiensi pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah dapat dianggap baik jika rasio yang dicapai kurang dari 10%, atau semakin rendah nilai rasio, semakin efisien kinerjanya.

Tabel 9 Tolak ukur

Koefisienan (%)	Kapasitas Keuangan
<10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21%-30%	Cukup Efisien
31%-40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber: (Manalu et al., 2022)

Rasio Derajat Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah

Menurut undang-undang yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 ayat 1 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya dimiliki seluruhnya atau sebagian besar oleh pemerintah daerah. Rasio tersebut memiliki manfaat untuk menilai sejauh mana kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan daerah diukur dengan membandingkan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan asli daerah (Mahmudi, 2016).

Tabel 10 Tolak ukur

Tingkat	Keterangan
0%-10%	Tidak berkontribusi
10%-30%	Berkontribusi rendah sekali
31%-40%	Cukup berkontribusi
41%-50%	Berkontribusi tinggi
>50%	Berkontribusi sangat tinggi

Sumber: (Mahmudi, 2016)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode analisis rasio keuangan yang berpusat pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jenis penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa data deret waktu yang terekam secara sistematis dan berasal dari publikasi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut akan dianalisis dengan mengacu pada teori-teori yang telah dikembangkan oleh para ahli di bidang ini (Siswanto & Maylani, 2022). Selanjutnya, hasil analisis ini akan disajikan secara naratif berdasarkan kondisi aktual di lapangan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kinerja keuangan pemerintah daerah. Analisis laporan keuangan ini

bertujuan untuk melihat permasalahan dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.

Subjek penelitian ini adalah kondisi kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Fokus kajian adalah laporan realisasi anggaran dari tahun 2013-2022. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dan angka selanjutnya adalah menghitung rasio keuangan berdasarkan data yang dikumpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang situasi keuangan induk dan perluasan pemerintah daerah, yang merupakan faktor penting dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi. Analisis ini melibatkan berbagai rasio yang meliputi: Rasio Tingkat Otonomi Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efektivitas Pengelolaan Fiskal Daerah, Rasio Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah, Rasio Tingkat Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah.

Metode penelitian ini menggunakan deskripsi kuantitatif untuk menganalisis informasi keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara dari tahun 2013 hingga 2022. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dilanjutkan dengan perhitungan terhadap data yang dikumpulkan. Data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan secara naratif untuk membantu pengambilan keputusan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah induk dan kabupaten yang berkembang. Berikut adalah berbagai rasio yang digunakan:

Rasio Tingkat Otonomi Daerah:

Rasio ini membandingkan realisasi total PAD dengan pendapatan transfer untuk mengukur kemandirian daerah dalam mendanai pemerintah sendiri (Budianto, 2021).

$$\text{Rasio Tingkat Otonomi} = \text{Total Realisasi PAD} \times 100\% / \text{Pendapatan Transfer}$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \text{Total PAD} \times 100\% / \text{Total Pendapatan Daerah}$$

Ukuran Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio ini digunakan sebagai patokan kewenangan yang digunakan dalam mengatur dan memaksimalkan pendapatan dengan membandingkan total PAD dengan pendapatan daerah.

$$\text{Rasio Ukuran Desentralisasi Fiskal} = \text{Total PAD} \times 100\% / \text{Total Pendapatan Daerah}$$

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mencapai pendapatan asli daerah yang dianggarkan.

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah} = \text{Realisasi Anggaran} \times 100\% / \text{Anggaran PAD}$$

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini diperlukan dalam mengukur pengeluaran pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mencapai realisasi pendapatan.

$$\text{Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD} \times 100\%}{\text{Realisasi PAD}}$$

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio tersebut merupakan pengukuran efektivitas pajak daerah dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap pajak daerah yang dicapai.

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Pajak Daerah}}$$

Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Rasio ini berkaitan dengan efisiensi pajak dimana semakin rendah rasionya, semakin baik kinerjanya.

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi Pajak Daerah}}$$

Rasio Tingkat Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah

Menurut undang-undang, BUMD adalah kepemilikan penuh atas modal yang dimiliki oleh pemerintah. rasio ini berguna untuk menilai kontribusi BUMD.

$$\text{Rasio Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Laba BUMD} \times 100\%}{\text{Realisasi PAD}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Tingkat Otonomi Daerah

Tabel 11. Skala Tingkat Otonomi

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan transfer	Rasio	Keterangan
2013	26.701.972.210,00	550.706.268.145,00	4,85%	Rendah sekali
2014	36.386.788.023,65	644.715.928.671,00	5,64%	Rendah sekali
2015	32.287.183.164,57	686.374.854.013,00	4,70%	Rendah sekali
2016	42.507.928.168,67	839.620.787.307,00	5,06%	Rendah sekali
2017	84.964.450.591,63	780.642.272.608,00	10,88%	Rendah sekali
2018	52.209.768.374,26	799.076.709.405,00	6,53%	Rendah sekali
2019	75.687.647.545,04	838.472.907.722,00	9,03%	Rendah sekali
2020	55.858.593.110,60	755.548.026.184,00	7,39%	Rendah sekali
2021	63.254.710.984,38	834.506.485.758,00	7,58%	Rendah sekali
2022	59.867.478.675,98	859.435.732.775,00	6,97%	Rendah sekali
Mean	52.972.652.085	758.909.997.259	6,98%	Rendah sekali

Sumber: Hasil olahan peneliti dari informasi laporan keuangan daerah pasca Pemeriksaan BPK Instruktif Sumatera Utara, 2024

Proporsi ini menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan transfer pendapatan yang diterima masing-masing Kecamatan Labuhanbatu Selatan, serta hasil pembangunan yang dicapai Labuhanbatu Selatan setiap tahunnya. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah upaya

pemerintah pusat dalam membangun Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah berhasil atau belum. Pengukuran didasarkan pada rasio proporsi otonomi rata-rata, dimana jika rasionya mendekati atau lebih baik dari kabupaten induk, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat belum optimal dalam melaksanakan pembangunan kabupaten induk.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Proporsi ketergantungan keuangan menurut data yang tercantum pada tabel 12, dimana proporsi rata-rata ketergantungan keuangan selama 10 tahun (2013-2022) di kabupaten ini adalah 90,75%, dapat disimpulkan bahwa kabupaten ini termasuk dalam kategori tinggi. Rasio tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebesar 115,06%, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 86,29%.

Tabel 12. Skala Ketergantungan Finansial Wilayah

Tahun	Penghasilan Transfer	Penghasilan Wilayah	Rasio	Keterangan
2013	550.706.268.145,00	618.909.256.455,88	88,98%	Tinggi
2014	644.715.928.671,00	681.102.716.694,65	94,66%	Tinggi
2015	686.374.854.013,00	729.737.181.477,57	94,06%	Tinggi
2016	839.620.787.307,00	883.193.630.275,67	115,06%	Tinggi
2017	780.642.272.608,00	869.128.797.799,63	88,39%	Tinggi
2018	799.076.709.405,00	888.480.477.980,26	89,94%	Tinggi
2019	838.472.907.722,00	971.732.667.267,04	86,29%	Tinggi
2020	755.548.026.184,00	861.754.899.294,60	87,68%	Tinggi
2021	834.506.485.758,00	939.476.497.742,38	88,83%	Tinggi
2022	859.435.732.775,00	919.303.211.450,98	93,49%	Tinggi
Rata-rata	758.909.997.259	836.281.933.643,87	90,75%	Tinggi

Sumber: Hasil olahan peneliti dari informasi laporan keuangan daerah pasca Pemeriksaan BPK Instruktur Sumatera Utara, 2024

Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal

Proporsi ini mengukur tingkat desentralisasi fiskal untuk menghasilkan pendapatan daerah dan membandingkan pendapatan daerah dengan pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin optimal pemberdayaan daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerahnya (Mahmudi, 2016). Berdasarkan hasil dan pengamatan yang terlihat pada tabel 13, dapat disimpulkan bahwa rasio proporsi rata-rata dari ukuran desentralisasi fiskal pada periode 10 tahun (2013-2022) di kabupaten ini hanya 6,21% dan termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan yang dilakukan belum berhasil. Rasio rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan persentase 9,78%, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2013 dengan persentase 4,31%.

Tabel 13. Skala Tingkat Desentralisasi Fiskus

Tahun	Penghasilan Transfer	Penghasilan Wilayah	Rasio	Keterangan
2013	26.701.972.210,00	618.909.256.455,88	4,31%	Rendah sekali
2014	36.386.788.023,65	681.102.716.694,65	5,34%	Rendah sekali
2015	32.287.183.164,57	729.737.181.477,57	4,42%	Rendah sekali
2016	42.507.928.168,67	883.193.630.275,67	4,81%	Rendah sekali
2017	84.964.450.591,63	869.128.797.799,63	9,78%	Rendah sekali
2018	52.209.768.374,26	888.480.477.980,26	5,88%	Rendah sekali
2019	75.687.647.545,04	971.732.667.267,04	7,79%	Rendah sekali
2020	55.858.593.110,60	861.754.899.294,60	6,48%	Rendah sekali
2021	63.254.710.984,38	939.476.497.742,38	6,73%	Rendah sekali
2022	59.867.478.675,98	919.303.211.450,98	6,51%	Rendah sekali
Mean	52.972.652.084,88	836.281.933.643,87	6,21%	Rendah sekali

Sumber: Hasil olahan peneliti dari informasi laporan keuangan daerah pasca Pemeriksaan BPK Instruktif Sumatera Utara, 2024

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Proporsi efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah yang sesuai dengan kapasitas riil di daerah setempat. Proporsi efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari data yang tercantum pada tabel 14, dimana proporsi rata-rata efektivitas PAD selama 10 tahun (2013-2022) di kabupaten ini adalah 92,93%, dapat disimpulkan bahwa kabupaten ini termasuk dalam kategori kurang efektif. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah telah berhasil mengembangkan kabupaten ini berdasarkan proporsi efektivitas PAD. Rasio tertinggi dicapai pada tahun 2017 sebesar 100,40%, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 86,94%.

Tabel 14. Skala Keefektifan PAD

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio	Keterangan
2013	26.701.972.210,00	30.075.500.000,00	88,78%	Cukup efektif
2014	36.386.788.023,65	37.135.297.933,00	97,98%	Cukup efektif
2015	32.287.183.164,57	41.625.150.000,00	86,94%	Cukup efektif
2016	42.507.928.168,67	46.169.542.000,00	92,07%	Cukup efektif
2017	84.964.450.591,63	84.625.912.176,76	100,40%	Sangat efektif
2018	52.209.768.374,26	57.290.705.012,00	91,13%	Cukup efektif
2019	75.687.647.545,04	80.836.375.990,00	93,63%	Cukup efektif
2020	55.858.593.110,60	62.591.251.032,00	89,24%	Cukup efektif
2021	63.254.710.984,38	68.733.071.152,00	92,03%	Cukup efektif
2022	59.867.478.675,98	61.652.362.901,00	97,10%	Cukup efektif
Rata-rata	52.972.652.084,88	57.073.516.819,68	92,93%	Cukup efektif

Sumber: Hasil olahan peneliti dari Informasi Laporan keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Instruktif Sumut, 2024

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Proporsi efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur seberapa efisien pemerintah dalam menarik penerimaan dari PAD dibandingkan dengan penerimaan aktual yang diperoleh pada periode tersebut. Semakin kecil rasio proporsi efisiensi, semakin efisien pula stakeholder pemerintah dalam membiayai perolehan PAD. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 15, dapat diketahui bahwa rata-rata proporsi efisiensi PAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama 10 tahun (2013-2022) mencapai 7,87%. Rasio rata-rata selama 10 tahun terakhir termasuk dalam kategori sangat efisien. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat telah berhasil membangun Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal efisiensi dalam memperoleh penerimaan dari PAD. Rasio rata-rata tertinggi tercatat pada tahun 2013 sebesar 13,04% dan rasio terendah pada tahun 2016 sebesar 6,71%.

Tabel 15. Skala Keefisienan PAD

Tahun	Biaya Perolehan PAD	Realisasi PAD	Rasio	Keterangan
2013	3.480.666.756,00	26.701.972.210,00	13,04%	Efisien
2014	-	36.386.788.023,65	-	-
2015	-	32.287.183.164,57	-	-
2016	2.851.900.000,00	42.507.928.168,67	6,71%	Sangat efisien
2017	3.758.049.640,00	84.964.450.591,63	4,42%	Sangat efisien
2018	5.260.015.382,00	52.209.768.374,26	10,07%	Efisien
2019	4.863.000.000,00	75.687.647.545,04	6,43%	Sangat efisien
2020	4.789.000.000,00	55.858.593.110,60	8,57%	Sangat efisien
2021	-	63.254.710.984,38	-	-
2022	-	59.867.478.675,98	-	-
Rata-rata	4.167.105.296,33	52.972.652.084,88	7,87%	Sangat efisien

Sumber: Hasil olahan peneliti dari informasi laporan keuangan daerah pasca Pemeriksaan BPK Instruktif Sumatera Utara, 2024

Rasio Efektivitas Pengelolaan Fiskal Daerah

Tabel 16. Skala Keefektivan Fiskus Daerah

Tahun	Realisasi Fiskus Daerah	Anggaran Fiskus Daerah	Rasio	Keterangan
2013	15.319.914.956,50	14.560.500.000,00	105,22%	Sangat efektif
2014	18.270.159.874,96	15.204.204.000,00	120,17%	Sangat efektif
2015	10.820.376.359,00	16.204.204.000,00	66,78%	Kurang Efektif
2016	14.133.129.408,00	16.624.204.000,00	85,02%	Kurang Efektif
2017	18.530.283.445,10	16.624.204.000,00	111,47%	Sangat efektif
2018	21.355.200.998,00	21.200.941.012,00	100,73%	Sangat efektif
2019	40.549.350.718,90	42.460.395.259,00	95,50%	Cukup efektif
2020	21.573.399.374,23	24.215.273.301,00	89,09%	Cukup efektif
2021	27.866.360.273,00	27.249.527.466,00	102,26%	Sangat efektif
2022	26.711.754.866,00	26.400.767.978,00	101,18%	Sangat efektif
Rata-rata	21.512.993.027,37	22.074.422.101,60	97,74%	Cukup efektif

Sumber: Hasil olahan peneliti dari informasi laporan keuangan daerah pasca Pemeriksaan BPK Instruktif Sumatera Utara, 2024

Analisis efektivitas fiskal daerah mengacu pada evaluasi kemampuan pemerintah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dan membandingkan realisasi pendapatan daerah dengan anggaran yang ditetapkan (Halim, 2012). Berdasarkan tabel 16, dapat diketahui bahwa rata-rata rasio proporsi efektivitas fiskus regional di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kurun waktu 10 tahun (2013-2022) mencapai 97,74% yang dapat dikategorikan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah berhasil mengembangkan Labuhanbatu Selatan. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai 120,17% dan rasio terendah terjadi pada tahun 2015 dengan nilai 66,78%.

Rasio Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah

Kinerja pemerintah daerah terkait biaya pemungutan jika dibandingkan dengan realisasi pajak daerah menjadi lebih efisien karena proporsinya menurun. Kabupaten Labuhanbatu Selatan terbukti memiliki kinerja yang efisien dalam mengumpulkan pendapatan daerah. Berdasarkan data tabel 17, rata-rata rasio efisiensi fiskal daerah pada periode 10 tahun (2013-2022) adalah 19,37%. Hal ini menunjukkan bahwa Labuhanbatu Selatan telah berhasil mengembangkan diri dengan baik dengan bantuan dari pemerintah pusat. Rasio tertinggi tercatat pada tahun 2018 sebesar 24,63%, sementara rasio terendah di tahun 2019 sebesar 11,99%.

Tabel 17. Skala Keefisienan Fiskus Daerah

Tahun	Biaya Pengumpulan	Realisasi Wilayah Fiskus	Rasio	Keterangan
2013	3.480.666.756,00	15.319.914.956,50	22,72%	Cukup efisien
2014	-	18.270.159.874,96	-	-
2015	-	10.820.376.359,00	-	-
2016	2.851.900.000,00	14.133.129.408,00	20,18%	Efisien
2017	3.758.049.640,00	18.530.283.445,10	20,28%	Efisien
2018	5.260.015.382,00	21.355.200.998,00	24,63%	Cukup efisien
2019	4.863.000.000,00	40.549.350.718,90	11,99%	Sangat efisien
2020	4.789.000.000,00	21.573.399.374,23	22,20%	Cukup efisien
2021	-	27.866.360.273,00	-	-
2022	-	26.711.754.866,00	-	-
Rata-rata	4.167.105.296,33	21.512.993.027,37	19,37%	Efisien

Sumber: Hasil olahan peneliti dari informasi laporan keuangan daerah pasca Pemeriksaan BPK Instruktif Sumatera Utara, 2024

Rasio Tingkat Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah

Proporsi ini berguna untuk menilai seberapa besar kontribusi laba BUMD terhadap pendapatan daerah dengan membandingkan laba BUMD dan realisasi PAD (Mahmudi, 2016). Berdasarkan analisis pada tabel 18, dapat diketahui bahwa proporsi rata-rata kontribusi BUMD dalam kurun waktu 10 tahun (2013-2022) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 2,87%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah pusat belum berhasil melaksanakan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rasio tertinggi pada tahun 2022 sebesar 4,56% dan rasio terendah pada tahun 2018 sebesar 2,87%.

Tabel 18. Skala Kontribusi BUMD

Tahun	Lab a BUMD	Realisasi PAD	Rasio	Keterangan
2013	-	26.701.972.210,00	-	-
2014	-	36.386.788.023,65	-	-
2015	-	32.287.183.164,57	-	-
2016	-	42.507.928.168,67	-	-
2017	-	84.964.450.591,63	-	-
2018	1.500.000.000,00	52.209.768.374,26	2,87%	Tidak berkontribusi
2019	2.388.709.808,00	75.687.647.545,04	3,16%	Tidak berkontribusi
2020	-	55.858.593.110,60	-	-
2021	2.388.709.808,00	63.254.710.984,38	3,78%	Tidak berkontribusi
2022	2.728.424.304,00	59.867.478.675,98	4,56%	Tidak berkontribusi
Rata-rata	900.584.392,00	52.972.652.084,88	2,87%	Tidak berkontribusi

Sumber: Hasil olahan peneliti dari informasi laporan keuangan daerah pasca Pemeriksaan BPK Instruktif Sumatera Utara, 2024

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rasio Tingkat Otonomi Daerah menunjukkan angka yang sangat rendah, dengan rata-rata 6,98%. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tergolong tinggi, dengan rata-rata 90,75%. Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal sangat rendah, dengan rata-rata 6,21%. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan klasifikasi yang kurang efektif, dengan rata-rata 92,93%. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah tergolong sangat efisien, dengan rata-rata 7,87%. Rasio Efektivitas Pengelolaan Fiskal Daerah menunjukkan kategori cukup efektif, dengan rata-rata 97,74%. Rasio Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah menunjukkan kategori efisien, dengan rata-rata 19,37%. Rasio Tingkat Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah menunjukkan kontribusinya sebesar 2,87%, sehingga dalam hal ini pemerintah pusat terbukti belum berhasil mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan kabupaten Labuhanbatu Selatan belum optimal dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis laporan keuangan yang menunjukkan bahwa dari delapan pengukuran rasio, yaitu: Rasio Tingkat Otonomi Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efektivitas Pengelolaan Fiskal Daerah, Rasio Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah, dan Rasio Tingkat Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah hanya empat yang berhasil, yaitu: Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efektivitas Pengelolaan Fiskal Daerah, dan Rasio Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah. Sementara itu, Rasio yang tidak berhasil adalah, Rasio Tingkat Otonomi Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Desentralisasi, dan Rasio Tingkat Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah.

Saran

Saran bagi pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mengelola keuangan daerah harus lebih bijak dalam rangka mendukung Pendapatan

Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat menggunakan perusahaan pabrik kelapa sawit yang berdiri di sana sebagai donatur dalam meningkatkan infrastruktur jalan untuk memudahkan kegiatan ekonomi Pemerintah juga dapat meningkatkan kesadaran perusahaan swasta yang ada untuk mematuhi kewajiban membayar pajak. Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus terus mensosialisasikan pajak melalui media seperti baliho, media sosial, dan sebagainya untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Selain itu, pemerintah harus meminimalkan biaya untuk mendapatkan pajak daerah dan mengevaluasi pengeluaran yang dikeluarkan untuk pengumpulan pajak. Untuk meningkatkan BUMD di Kecamatan Labuhanbatu Selatan, dapat dilakukan dengan mengadakan BUMDES di setiap desa yang ada serta rutin menilai suku bunga dan tabungan yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (2024a). *Tingkat Kemiskinan Kabupaten LabuhanBatu Selatan 2013-2022*. Bps Labuhan Batu Selatan. <https://labuhanbatuselatankab.bps.go.id/indicator/23/128/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (2024b). *Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013-2022*. Bps Labuhan Batu Selatan. <https://labuhanbatuselatankab.bps.go.id/>
- Budianto, A. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Wacana Kinerja*, 32, 1–18.
- Dianti, Y. (2017). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Kbuupaten Cianjur. *Jurnal Akunida*, 3, 5–24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah* (A. Halim (ed.); 4th ed.). salemba empat.
- Halim, A. (2015). *Analisis Investasi Dan Aplikasinya : Dalam Aset Keuangan Dan Aset Rill*. salemba empat. <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-e-202111122797>
- Hasanah, N. T., Widiarti, N. W., & S.Sudarno. (2018). Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting(ISR0. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5, 115–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i2.8645>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Mahmudi (ed.); 3rd ed.). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
- Manalu, Y. J., Sianturi, J., Siagian, K., Purba, F., & Purba, K. (2022). Tata Kelola Pemerintah Pusat Dalam Pengembangan Kabupaten Tapanuli Selatan. *Media Riset Akuntansi,Auditing & Informasi*, 2, 17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v22i2.15103>
- Muhamad nur afandi, & Sianipar, R. (2012). Analisi Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. *Statistisi Diskominfo Kab.Magelang*, 19(2), 1–22. <http://jwk.bandung.lan.go.id/ojs/index.php/jwk/article/view/1>

- Poluakan, M. ., & Nurwati, N. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Kultural di Indonesia. *Jurnal Sosio Informa*, 5, 177–188.
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan Ekonomi Di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Pekerjaan Sosial*, 5, 72–81. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Riesdi, A. M. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 15–33.
- Ritonga, F. U., Suriadi, A., & Isworo, H. (2023). Analisis Pemetaan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari Perspektif Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Studi Pembangunan*, 2, 88–91. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i2.13491>
- S.Sukirno. (2005). *Pengantar Ekonomi Makro* (ketiga). PT.Raja Grafindo Persada.
- Safari, C. T. (2019). Analisis Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 66–78. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7637>
- Simanjuntak, rimky mandala putra, Purba, S., & Butar, erissa antheresya butar. (2022). Analisis Informasi Keuangan Dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 222–235. <https://doi.org/10.37932/ja.v11i2.607>
- Siswanto, & Maylani, dita asri. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 130–138. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Vurry, A. N., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Manajemen*, 4(2), 128–135.
- Wibowo, F. H., & Purwaningsih, E. (2019). Pengaruh Nilai APBD, Total Aset, Opini Audit, Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Audit Delay Pemerintah Daerah Di Subosukowonosraten. *Jurnal Media Akuntansi*, 93, 11–20.
- Wicaksono, S. P., & Hutajulu, D. M. (2023). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1999-2020. *Tranekonomika: Akuntansi, Bisnis, Dan Keuangan*, 3, 379–388. <https://doi.org/10.55047/tranekonomika.v3i2.393>